

Majuro Declaration: “Kudeta” Kepemimpinan Isu Perubahan Iklim

Muhammad Riza Hanafi

Abstrak

Ketika negara-negara besar tak lagi bersedia memimpin penanganan terhadap isu perubahan iklim, negara-negara Kepulauan Pasifik memproklamkan diri sebagai pemimpin. Bagi mereka, “To lead is to act,” memimpin adalah dengan bertindak. Melalui Majuro Declaration negara-negara tersebut tidak hanya menyatakan kepemimpinannya namun juga menyatakan komitmennya untuk melakukan tindakan nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Hanya saja, deklarasi ini ironis mengingat bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terkecil di dunia namun paling rentan perubahan iklim. Jika produksi emisi gas rumah kaca tetap pada laju seperti sekarang maka kenaikan tinggi air laut dipastikan akan menenggelamkan sebagian dari wilayah mereka. Berharap pada negara-negara maju untuk “memimpin” dunia mengatasi perubahan iklim bukan perkara mudah. Kisah “tragis” Protokol Kyoto yang “ditinggalkan” oleh negara-negara emiter besar membuktikan teorema realis bahwa setiap negara hanya membela kepentingannya masing-masing. Deklarasi Majuro adalah penegasan terhadap posisi mereka, soft power mereka, sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan otoritas moral untuk berseru agar dunia serius mengatasi perubahan iklim.

Kata kunci: Perubahan iklim, Kepulauan Pasifik, soft power, Majuro Declaration

Latar Belakang

Pada konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Kyoto, Jepang, sejumlah negara sepakat mengatasi perubahan iklim ini dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kesepakatan ini terwujud dalam sekumpulan aturan tentang pengurangan emisi yang kemudian disebut Protokol Kyoto. Protokol ini baru dinyatakan mulai berlaku 16 Februari 2005, tepat 90 hari setelah Rusia meratifikasinya pada 18 November 2004. Pemberlakuan ini sesuai dengan aturan yang menyatakan Protokol Kyoto baru berlaku mengikat setelah 90 hari semua persyaratan terpenuhi.

Dalam perkembangannya protokol Kyoto mengalami kemunduran ketika langkah Amerika Serikat dan Australia¹ yang memutuskan keluar diikuti oleh negara-negara Annex I yang lain seperti Jepang dan Kanada. Keluarnya Kanada pada akhir 2011 merupakan yang terbaru. Pemerintah Kanada beralasan bahwa mereka terpaksa harus keluar dari protokol Kyoto karena tidak mampu memenuhi target pengurangan emisi pada tahun 2012.² Perdana Menteri Kanada mengatakan bahwa untuk memenuhi target pengurangan emisi tersebut maka mobil harus dilarang beredar di jalanan. Jika Kanada tidak keluar maka negara produsen Blackberry tersebut harus membayar denda sebesar 14 miliar dolar Kanada (sekitar Rp123,3 triliun berdasarkan kurs saat itu) karena gagal memenuhi target pengurangan emisinya berdasarkan ketentuan Protokol Kyoto.

Kondisi di dalam Protokol Kyoto ini yang membuat masa depan rezim pengurangan emisi gas rumah kaca suram. Pun demikian nasib negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan. Negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan adalah kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) meramal bahwa pada tahun 2100 peningkatan tinggi permukaan air laut berkisar antara 15 – 95 cm.³ Data itu pun merujuk pada laju emisi pada tahun 1996, yang mana tidak secepat sekarang⁴. Bagi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan yang puncak tertingginya hanya beberapa meter, kenaikan tersebut tentu menjadi masalah besar.

Meskipun perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan, perdebatan tentang perubahan iklim seringkali tidak melibatkan mereka. Perdebatan hanya melibatkan negara-negara besar yang notabene adalah negara-negara dengan emisi terbesar di dunia. Negara seperti Amerika Serikat menolak untuk bergabung dengan rezim di mana negara

¹ Walaupun pada tahun 2007, di bawah perdana menteri yang baru terpilih pada saat itu, Kevin Rudd, Australia kembali masuk dalam Protokol Kyoto dan meratifikasinya.

² Armandhanu, Denny dan Indrani Putri, 2011, *Kanada Mundur dari Protokol Kyoto*, Vivanews, 13 Desember 2011, diunduh dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/271892-kanada-mundur-dari-protokol-kyoto> pada 6 Mei 2015.

³ Burns, William C. G., 2003, "The Impact of Climate Change on Pacific Island Developing Countries in the 21st Century", in Alexander Gillespie and William C.G. Burns (eds.), *Climate Change in the South Pacific: Impacts and Responses in Australia, New Zealand, and Small Island States*, Kluwer Academic Publishers, New York

⁴ *Ibid.*

penyumbang emisi besar seperti China dan India tidak mendapatkan kewajiban yang sama. China dan India sendiri pun beralasan bahwa mereka masih perlu menggenjot industri tanpa terbebani pengurangan emisi demi pembangunan.⁵ Sikap negara-negara yang meninggalkan Protokol Kyoto ini membuktikan prediksi realistis bahwa setiap negara akan selalu berpihak pada kepentingannya masing-masing. Sehingga, berharap pada kepemimpinan negara-negara besar untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim adalah sesuatu yang sulit tercapai.

Menghadapi kenyataan ini, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan pun mengambil langkah. Pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 Pacific Islands Forum (PIF) yang diadakan di Majuro, Marshall Islands, 5 September 2013, mereka mendeklarasikan *Majuro Declaration*. Deklarasi ini adalah sebuah pernyataan sekaligus komitmen negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan untuk memimpin isu perubahan iklim (*climate leaders*)⁶. Melalui deklarasi tersebut negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Deklarasi ini ironis karena negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan adalah kelompok negara dengan emisi gas rumah kaca terkecil di dunia.⁷ Untuk emisi gas karbondioksida, dari kawasan-kawasan yang ada di dunia, hanya kawasan sub sahara yang mengalahkan emisi per kapita negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan.⁸ Dengan tingkat emisi yang minim, upaya yang mereka lakukan tidak akan membawa dampak besar bagi perubahan iklim.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat nilai strategis “Majuro Declaration” bagi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan dalam isu perubahan iklim. Penulis akan melihat kondisi dan posisi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan dalam

⁵ Friedman, Thomas L., 2009, *Hot, Flat and Crowded: Mengapa Dunia Memerlukan Revolusi Hijau – dan Bagaimana Kita Memperbarui Masa Depan Global Kita (terj)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁶ Dorney, Sean, 2013 *Forum Pasifik bertekad pimpin dunia hadapi perubahan iklim*, Radio Australia, 6 September 2013, diunduh dari <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-09-06/forum-pasifik-bertekad-pimpin-dunia-hadapi-perubahan-iklim/1186927> pada 6 Mei 2015

⁷ The World Bank, Environment, diunduh dari <http://data.worldbank.org/topic/environment> pada 10 September 2015.

⁸ *Ibid.*

isu perubahan iklim menjadi *soft power* yang bersumber pada dari legitimasi dan otoritas moral. *Deklarasi Majuro* sendiri akan dilihat sebagai upaya mengkomunikasikan soft power ini agar mendapatkan pengaruh di lingkungan internasional.

Soft Power

Hans Morgenthau mengatakan bahwa kekuasaan adalah hubungan antara dua aktor politik di mana salah satu aktor memegang kontrol atas pemikiran dan tindakan aktor yang lain⁹. Lebih jauh dia juga mengatakan bahwa kekuasaan berhubungan erat dengan kepemilikan sumber-sumber power yang meliputi: populasi, territorial, sumber-sumber alam, jangkauan ekonomi, kekuatan militer dan stabilitas politik. Dari pengertian Morgenthau tersebut ada dua hal yang penting dalam memahami power: power sebagai hubungan relasional (hubungan antara dua aktor politik) dan power sebagai atribut (kepemilikan atas sumber-sumber kekuasaan).

Definisi lain yang menunjukkan dimensi relasional power adalah yang disampaikan oleh Robert Dahl. Dahl mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat aktor lain melakukan apa yang sebenarnya tidak dia inginkan atau tidak melakukan apa yang sebenarnya dia inginkan.¹⁰ Pemikir yang melihat kekuasaan dari tinjauan kepemilikan (atributif) salah satunya adalah Karl Deutch. Menurut pendapat Deutch, ada tiga dimensi kekuasaan yang dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menganalisa proyeksi kekuatan suatu negara. Deutsch menyebut tiga dimensi itu adalah *power domain*, *range* dan *scope*¹¹.

Lantas bagaimana dengan kekuasaan yang tidak bersifat materiil. Misal, bagaimana menjelaskan kekuasaan yang dimiliki Norwegia di bidang perdamaian? Atau bagaimana mendefinisikan kekuasaan Amerika Serikat melalui

⁹ Morgenthau, Hans J., 1955, *Politic Among Nation*, Alfred Knopf, New York

¹⁰ Robert Dahl, 1970 seperti dikutip Chris Brown dan Kirsten Ainley, *Understanding International Relations* (3rd ed.), Palgrave MacMillan, New York: 2005

¹¹ Untuk istilah *power range* yang digunakan oleh Deutsch, Coulombis dan Wolfe menggunakan istilah *Intensity* untuk menggantikannya. Theodore A. Coulombis dan John H. Wolfe, *Introduction to International Relation*, Prentice-Hall, New Jersey:1985 lihat juga Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta: 1994

Hollywood-nya yang mampu menciptakan standar tentang perfilman? Atau bagaimana menjelaskan kekuasaan yang dimiliki Belanda di bidang hukum sehingga mampu “membujuk” komunitas internasional untuk menempatkan Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) di wilayahnya?

Joseph Nye membuat klasifikasi kekuasaan menjadi dua: Hard Power dan Soft Power. Kekuatan yang ditanyakan di atas dia klasifikasikan sebagai soft power, sementara power yang dibicarakan Deutch dan Morgenthau diklasifikasikannya sebagai hard power.¹² *Hard power* adalah kontrol atas pikiran dan tingkah laku seseorang didasarkan atas adanya mekanisme hukuman dan penghargaan. Jadi, ketika A melakukan apa yang diinginkan B karena B mengancam akan memukulnya, maka itu adalah *hard power*. Demikian pula ketika A menuruti keinginan B hanya karena B menjanjikan sebuah hadiah padanya jika keinginannya terpenuhi. Nye menggolongkan ini sebagai *hard power* juga. Intinya, *hard power* merupakan konsep yang menggunakan pendekatan *stick and carrot*, hukuman dan penghargaan.

Nye mengatakan bahwa soft power sebuah negara pada dasarnya bersumber pada tiga hal yakni, budaya, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.¹³ Budaya menjadi sumber soft power sebuah negara jika dan hanya jika budaya tersebut dianggap menarik oleh penduduk negara lain. Nilai-nilai politik sebuah negara akan memiliki soft power jika ada pandangan sama terkait nilai-nilai tersebut. Norma perdagangan bebas akan menarik bagi negara-negara yang memiliki pandangan yang sama, namun tidak akan menarik bagi negara yang menganggap bahwa perdagangan bebas adalah produk kapitalisme, seperti Korea Utara atau Venezuela, misalnya. Kebijakan luar negeri (terkadang juga dalam negeri) juga dianggap Nye sebagai sumber soft power jika memiliki legitimasi dan otoritas moral. Nye mencontohkan kebijakan anti segregasi rasial yang diterapkan tahun 1950an merupakan sumber soft power penting Amerika Serikat terutama di Afrika¹⁴. Sebagai dampak dari kebijakan itu, Amerika Serikat memiliki pengaruh

¹² Nye, Joseph S., Jr, 2004, “*Soft Power: The Means to Success in World Politics*,” Public Affairs Book, New York

¹³ Ibid.

¹⁴ Nye, Joseph S., Jr, 2004, *log. cit.*

besar di Afrika, terutama Afrika Selatan. Di sisi lain, kebijakan Amerika Serikat tentang kepemilikan senjata api dan pemberlakuan hukuman mati membuat soft power negara Paman Sam berkurang di Eropa.

Amerika Serikat memiliki soft power yang besar pasca tragedi 11 September. Ini terlihat dari dukungan yang luas diberikan oleh publik internasional ketika negara Paman Sam tersebut mengumandangkan kebijakan war on terror. Perang Afghanistan yang menjadi kelanjutan dari kebijakan tersebut pun mendapatkan dukungan yang luas. Ini karena AS memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan “*self defence*” sesuai dengan UN charter Article 51, yang kemudian diperkuat dan ditegaskan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1373 (2001). Resolusi ini melengkapi resolusi 1368 (2001) yang memberikan landasan hukum untuk memberikan sanksi tidak hanya pada pelaku terorisme namun juga kepada negara yang melindunginya.

Dari pengalaman Afrika Selatan, soft power didapatkan melalui keputusan negara tersebut untuk melucuti senjata nuklirnya pada 1990an. Afrika Selatan adalah negara yang secara de facto memiliki senjata nuklir pada tahun 1970an namun berada di luar mekanisme rezim Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT). Situasi ini kemudian yang meletakkan Afrika Selatan dalam posisi konfrontatif dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)¹⁵. Keputusan Afrika Selatan untuk melucuti senjata nuklirnya membawa dampak material maupun non material bagi negara tersebut. Dampak materialnya terlihat dari kerjasama pengembangan nuklir untuk tujuan damai melalui pembangunan dan pengawasan reaktor nuklir, sementara dampak non materialnya terlihat semakin meningkatnya citra Afrika Selatan di dunia. Pelucutan persenjataan nuklir oleh Afrika Selatan membuat bekas negara apartheid tersebut memiliki otoritas moral (karena menjadi warga dunia yang baik) dan legitimasi sebagai mantan negara dengan kekuatan nuklir yang patuh dengan mekanisme di dalam rezim NPT.

¹⁵ van Wyk, Jo-Ansie, 2012, Nuclear diplomacy as niche diplomacy: South Africa's post-apartheid relations with the International Atomic Energy Agency, South African Journal of International Affairs, 19:2

Legitimasi dan Otoritas Moral: Kerentanan dan Kontribusi Emisi

Isu perubahan iklim tidak lepas dari negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan. Kondisi geografis yang dikelilingi lautan membuat negara-negara di kawasan ini tidak hanya rentan terhadap kenaikan tinggi permukaan laut, namun juga peristiwa cuaca ekstrem seperti badai dan gelombang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian negara di kawasan ini terdiri dari gugusan atol yang tidak hanya menyediakan sedikit ruang untuk bisa ditinggali, namun juga memiliki ketinggian yang terbatas. Ada beberapa skenario untuk memproyeksikan kenaikan tinggi permukaan air laut. Melihat dari skenario-skenario tersebut rata-rata peningkatan tinggi permukaan laut berkisar antara 8 - 13 cm pada tahun 2030, 17 – 29 cm pada 2050 dan antara 35 sampai 82 cm pada 2100.¹⁶ Bahkan proyeksi terburuk *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebut angka terburuk pada tahun 2100 adalah 95 cm.¹⁷ Untuk khusus kawasan Kepulauan Pasifik Selatan sendiri, penelitian tahun 1999 menunjukkan bahwa kenaikan tinggi permukaan air laut di kawasan tersebut adalah 25 milimeter atau 2,5 cm per tahun yang lebih dari sepuluh kali lipat trend kenaikan global.¹⁸

Kawasan Kepulauan Pasifik Selatan sendiri terdiri dari 200 pulau dengan dataran yang cukup tinggi dan 2500 pulau berdataran rendah dan atol. Bagi negara-negara dengan dataran yang tinggi kenaikan tinggi permukaan laut tersebut mungkin tidak berarti apa-apa. Namun bagi negara-negara dengan ketinggian rendah, kenaikan tersebut menjadi permasalahan serius. Apalagi jika ditambah fakta bahwa negara-negara tersebut berbentuk kepulauan dimana dataran dikepung laut dari semua sisinya. Peningkatan air laut dapat diartikan sebagai hilangnya daratan. Tabel di bawah ini mencatat ketinggian maksimal negara-negara di Kepulauan Pasifik Selatan.

Tabel 1: Ketinggian Maksimal Negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan

¹⁶ Hemming, D. et al., 2007, "Impacts of mean sea level rise based on current state-of-the-art modelling", Hadley Centre for Climate Prediction and Research, Exeter dalam Brown, Oli, 2008, *Migration and Climate Change*, International Organization for Migration (IOM) Migration Research Series, Jenewa, diunduh dari <http://www.iom.int> pada 1 April 2014

¹⁷ Burns, 2003, *Log. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

| Nama Negara | Luas Wilayah (km persegi) | Ketinggian Maksimal Termasuk Tinggi Gunung (meter) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Cook Islands | 180 | 652 |
| Federated States of Micronesia | 702 | 791 |
| Fiji | 18.376 | 1,324 |
| Kiribati | 726 | 81 |
| Marshall Island | 720 | 10 |
| Nauru | 21 | 61 |
| Niue | 258 | 68 |
| Palau | 500 | 242 |
| Papua New Guinea | 461.690 | 4,509 |
| Samoa | 2.943 | 1,857 |
| Solomon Island | 29.785 | 2,447 |
| Tonga | 696 | 1,033 |
| Tuvalu | 26 | 5 |
| Vanuatu | 12.189 | 1,877 |

Sumber: World Atlas (<http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/highlow.htm>)

dan Gillet, 2011

Menilik pada tabel 1, maka negara yang rentan dengan meningkatnya ketinggian permukaan air laut adalah Tuvalu. Ini karena di semua wilayahnya, ketinggian tertinggi hanyalah 5 meter. Namun itu tidak berarti bahwa hanya Tuvalu yang terancam dengan peningkatan ketinggian permukaan air laut. Karena kenaikan tinggi air laut bagi negara-negara atol redah seperti Marshall Islands, Tuvalu, Nauru, dan Kiribati akan berakibat cukup fatal. Kenaikan tinggi permukaan air laut sebesar satu meter menyebabkan Manuro Atol di Marshall Islands kehilangan 80 persen daratannya. Meskipun hanya dilihat dari satu atol, namun kehilangan 80 persen daratan tersebut berarti hilangnya tempat tinggal 50

persen populasi seluruh negara. Sementara di Kiribati, contoh lainnya, jumlah luasan yang hilang adalah 12,5 persen.¹⁹

Tahun 1999 dua pulau tak berpenghuni di Kiribati, yakni Tebua Tarawa dan Abanuea, tenggelam di dasar lautan.²⁰ Meskipun memiliki ketinggian maksimal 81 meter, namun ketinggian rata-ratanya hanyalah 2 meter.²¹ Jika prediksi kenaikan tinggi permukaan air laut pada tahun 2100 benar-benar mencapai 100 cm, maka pada saat itu terjadi sebagian besar (karena sebagian besar wilayah Kiribati adalah dataran rendah) sudah tenggelam di dasar lautan menyusul kedua pulau (Tebua Tarawa dan Abanuea) yang sudah duluan menjadi dasar lautan.

Tuvalu adalah negara lain yang terancam kenaikan tinggi permukaan air laut. Dengan luas wilayah 25 km persegi dan ketinggian maksimal 5 meter (terendah dibandingkan dengan negara dengan pulau atol yang lain) maka jika laut mengalami kenaikan hingga lima meter, maka Tuvalu akan negara pertama yang hilang seluruhnya di bawah laut.²²

Masalah yang mengikuti kenaikan tinggi permukaan air laut adalah keberadaan infrastruktur di negara-negara tersebut yang sebagian besar berada di wilayah pesisir, serta kepadatan penduduk yang tinggi.²³ Jalan, gedung dan infrastruktur lain banyak terdapat di daerah pesisir. Pusat-pusat pemukiman juga di wilayah pesisir. Kehilangan daerah pesisir karena kenaikan tinggi permukaan laut akan membawa dampak serius bagi perekonomian karena perlu untuk melakukan relokasi tidak hanya populasinya, namun juga infrastruktur yang dimiliki. Apalagi ditambah dengan kondisi bahwa aktivitas ekonomi penduduk, seperti bercocok tanam, menangkap ikan, pasar dan sebagainya banyak dilakukan di wilayah pesisir.

¹⁹ Ibid, hal 235

²⁰ Kirby, Alex, 1999, Islands disappear under rising seas, BBC News 14 Juni 1999, diunduh dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/368892.stm> pada 13 Agustus 2015

²¹ Anonim, 2013, Kiribati island: Sinking into the sea? BBC, 25 November 2013, diunduh dari <http://www.bbc.com/news/science-environment-25086963> pada 1 April 2014

²² Knox, Angie, 2002, Sinking Feeling in Tuvalu, BBC News 28 Agustus 2002, diunduh dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2219001.stm> pada 13 Agustus 2015

²³ Burns, 2003. *Log. Cit.*

Kehilangan wilayah hanyalah permulaan. Semakin jauhnya intrusi air laut adalah masalah selanjutnya. Jumlah air bersih yang terbatas di negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan semakin berkurang karena intrusi air laut.²⁴ Kenaikan tinggi permukaan air laut hanyalah salah satu faktor yang menyebabkan intrusi air laut. Karena persediaan air bersih sangat tergantung pada hujan, maka perubahan pola cuaca mempengaruhi jumlah persediaan air tanah. Ketika persediaan air tanah berkurang, maka air laut dapat dengan mudah masuk ke daratan. Kenaikan tinggi permukaan air laut di beberapa negara Kepulauan Pasifik Selatan dapat berdampak pada hilangnya 50 persen cadangan air bersih.²⁵

Gelombang pasang juga memberikan kontribusi dalam intrusi air laut.²⁶ Gelombang yang semakin tinggi membuat semakin banyak air laut yang terbawa masuk ke daratan. Akibat lain dari masuknya air laut ke daratan selain terkait dengan air bersih adalah semakin tingginya kadar garam di tanah sehingga tanah kehilangan kesuburan. Kondisi inilah yang membuat Presiden Kiribati, Anote Tong, mengatakan bahwa dalam kurun waktu 60 tahun negaranya tidak akan bisa dihuni.²⁷ Menurut Tong kelangkaan air dan intrusi air laut yang membuat banyak wilayah di Kiribati yang tidak bisa dihuni bahkan sebelum tenggelam di bawah lautan. Akibatnya, gelombang urbanisasi semakin tinggi dan banyak penduduk yang berbondong-bondong memenuhi ibukota, Tarawa Selatan, untuk bisa bertahan hidup. Tanah pertanian pun semakin terbatas dan tidak cukup bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Presiden Tong pun pada 2013 mengumumkan akan membeli tanah dari Fiji. Pembelian tanah tidak bisa dihindari lagi. Menurut Presiden Kiribati tanah yang akan dibeli tersebut tidak hanya akan dijadikan sebagai lahan pertanian, namun juga sebagai persiapan jika pada suatu waktu Kiribati tidak bisa dihuni

²⁴ Burns, 2003. Log Cit.

²⁵ Ibid, hal 142

²⁶ Ibid

²⁷ Vidal, John, 2013, 'We are fighting for survival,' Pacific islands leader warns Atolls are at risk of becoming uninhabitable as sea levels rise, Marshall islands president will tell summit, The Observer, 1 September 2013, diunduh dari <http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/01/pacific-islands-climate-change> pada 1 April 2014

kembali.²⁸ Migrasi, menurut Tong merupakan cara untuk bertahan hidup, bukan lagi sebuah pilihan. Juli 2014, Tong mengumumkan pembelian lahan seluas 20 kilometer persegi di Pulau Vanua Levu, salah satu pulau di kepulauan Fiji, sekitar 2000 km dari Kiribati.²⁹ The Church of England menjual tanah yang sebagian besar masih tertutup hutan lebat tersebut senilai 8,77 juta dolar AS. Tong mengatakan beberapa pulau di negaranya telah ditinggalkan karena lahan pertanian di dataran rendah tidak lagi produktif karena kontaminasi air laut akibat badai yang menerpa pulau-pulau tersebut. Dia berhadapan pembelian tanah di Fiji bisa menjamin keamanan pangan di Kiribati.

Kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri vital bagi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan. Ini mengingatkan bahwa 40 persen GDP negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan digunakan untuk belanja makanan.³⁰ Ketidakmampuan menghasilkan bahan makanan akan menyebabkan berkurangnya kedaulatan pangan negara-negara tersebut, sehingga semakin menimbulkan ketergantungan terhadap negara lain. Dari uraian di atas terlihat bagaimana situasi yang dihadapi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan dan kondisi mereka miliki menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap perubahan iklim. Sayangnya wacana tentang perubahan iklim bukan milik mereka meskipun mereka adalah korban perubahan iklim yang sesungguhnya.

Meskipun harus menghadapi ancaman perubahan iklim, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan memiliki sumbangsih emisi kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan emisi karbondioksida per kapita kawasan Kepulauan Pasifik Selatan dibandingkan kawasan-kawasan lain di dunia. Dari gambar tersebut terlihat bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan memiliki emisi karbondioksida per kapita jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain atau

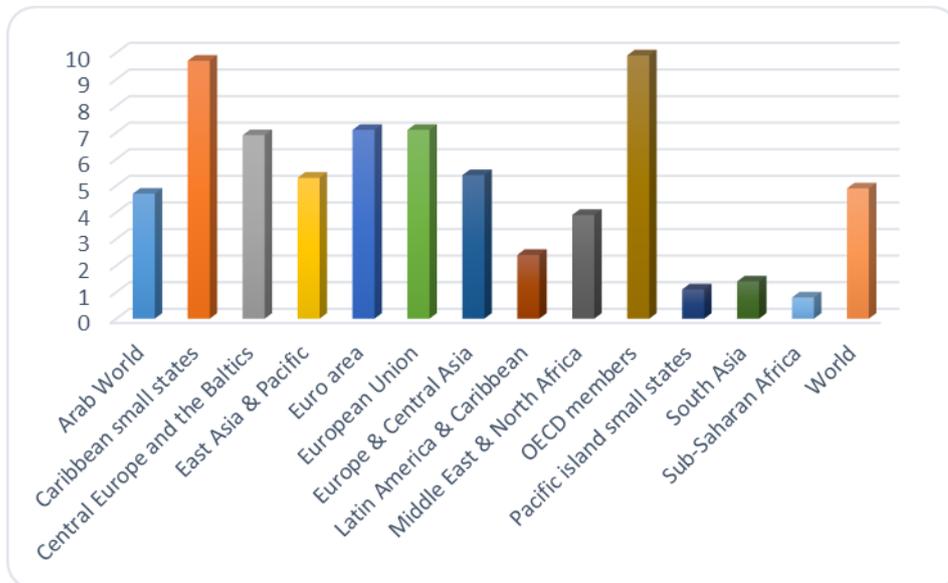
²⁸ Leoni, Brigitte, Migration not a matter of choice but survival, says Kiribati President, The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 15 Maret 2012, diunduh dari <http://www.unisdr.org/archive/25649> pada 1 April 2014

²⁹ Caramel, Laurence, 2014, Besieged by the rising tides of climate change, Kiribati buys land in Fiji, the Guardian online, 1 July 2014, diunduh dari <http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-climate-change-fiji-vanua-levu> pada 12 Agustus 2015.

³⁰ Burns, 2003, hal. 244 *Log. Cit.*

bahkan dunia. Hanya kawasan sub sahara saja yang tingkat emisi karbondioksida per kapitanya lebih rendah dari negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan.

Gambar 1: Perbandingan Emisi Karbondioksida Per Kapita Kawasan-kawasan di Dunia(dalam metric ton)



Sumber: World Bank (<http://data.worldbank.org/topic/environment>)

Sementara jika dilihat emisi karbon dioksida secara keseluruhan, maka akan terlihat jika emisi satu kawasan secara menyeluruh jika dijumlahkan masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tabel di bawah ini menunjukkan data tersebut.

Tabel 2: Perbandingan Emisi Karbondioksida

| Negara/Kawasan | Emisi Karbon (dalam metric tons) |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kepulauan Pasifik Selatan | 7,661 ³¹ |
| China | 9.019.518 |
| United Kingdom | 448.236 |
| United States | 5.305.570 |
| Indonesia | 563.985 |

Sumber: World Bank (<http://data.worldbank.org/topic/environment>)

Dari tabel tersebut terlihat bagaimana emisi karbondioksida negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan, jika dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat, maka emisi gas karbon dioksida negara-negara Pasifik Selatan sangat jauh di bawahnya.

Kepulauan Pasifik Selatan rentan terhadap perubahan iklim. Tidak hanya mereka menghadapi dampak langsung dari perubahan iklim namun juga memiliki kapabilitas terbatas untuk menanggulangnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara industri yang menguasai wacana tentang perubahan iklim, maka negara-negara di Kepulauan Pasifik Selatan memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk menyerukan kepada dunia agar mengurangi emisi gas rumah kaca. Legitimasi ini berasal dari situasi dan kondisi mereka sebagai “korban” dari perubahan iklim. Legitimasi ini yang menjadi sumber *soft power* negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan ketika mereka menuntut dunia untuk membuat perubahan dan bertindak mengatasi isu perubahan iklim.

Merujuk pada kasus Kanada dan Afrika Selatan di mana otoritas moral bisa bersumber dari penempatan status negara tersebut sebagai “*good international citizen*,”³² maka untuk kasus perubahan iklim, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan adalah juga “*good international citizen*.” Meskipun

³¹ Data tidak menghitung emisi dari Tuvalu, Nauru, Niue dan Cook Islands karena tidak tersedia di database World Bank.

³² Henrikson, 2005

berstatus sebagai “korban” perubahan iklim, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan adalah salah satu kawasan penyumbang emisi gas rumah kaca terkecil.

Mengkomunikasikan Soft Power: Majuro Declaration

Deklarasi yang terdiri dari 17 poin ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang ancaman perubahan iklim secara umum sementara bagian kedua membahas tentang tanggung jawab negara-negara PIF untuk bertindak mengatasi masalah tersebut. Bagian ketiga adalah bagian penting dari deklarasi ini karena pada bagian tersebut ditegaskan komitmen negara-negara PIF untuk menjadi pemimpin dalam isu perubahan iklim.³³

Deklarasi Majuro yang ditandatangani di akhir pertemuan tahunan PIF yang diadakan di ibukota Marshall Island, Majuro, merupakan inisiatif dari tuan rumah. Setelah berjuang melawan kekeringan sejak Mei 2013 yang menyebabkan 6000 orang di negara kepulauan Atol tersebut hanya mengandalkan kurang dari satu liter air per hari,³⁴ Pemerintah Marshall Island menuduh bahwa perubahan iklim lah yang menyebabkan bencana tersebut.³⁵ Terkait dengan bencana kekeringan tersebut, pemerintah sudah menetapkan negara dalam keadaan bencana pada 7 Mei 2013 dan meminta bantuan luar negeri. Ketika bantuan didistribusikan gelombang pasang menghantam kota Majuro, merusak tembok laut sehingga membanjiri bandara udara. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Marshall Islands, Tony de Brum, menyerukan komitmen politik pemimpin-pemimpin dunia untuk menanggulangi perubahan iklim. “*What we*

³³ Pacific Islands Forum Secretariat, 2013, Forum Communique, Forty-Fourth Pacific Islands Forum Majuro, Republic Of The Marshall Islands, 3 – 5 September 2013, diunduh dari http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2013_Forum_Communique_Final.pdf 28 September 2015

³⁴ Associated Press in Majuro, 2013, Marshall Islands face acute water shortage, The Guardian online, 10 Mei 2013, diunduh dari <http://www.theguardian.com/world/2013/may/10/marshall-islands-acute-water-shortage> pada 13 September 2015.

³⁵ Republik Marshal Islands, 2013, Press Release: Climate Change Battering the Marshall Islands, Yokwe Online 23 Juni 2013, diunduh dari <http://www.yokwe.net/index.php?module=News&func=display&sid=3187> pada 13 September 2013

need is a new wave of climate leadership (yang kami inginkan adalah gelombang baru kepemimpinan iklim),” kata de Brum.³⁶

Pertemuan tahunan PIF yang menghadirkan pemimpin dari negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan, termasuk Australia dan Selandia Baru, serta partner dialog dari negara-negara emiter besar seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, India, Jepang dan Kanada diharapkan mampu melahirkan pemimpin dalam mengatasi perubahan iklim. *“At the Forum, we will propose a Majuro Declaration for Climate Leadership to galvanize more urgent and concrete action on climate change* (pada forum tersebut kami akan mengusulkan sebuah Deklarasi Majuro untuk Kepemimpinan Iklim untuk memperkuat tindakan yang mendesak dan kongkrit terkait perubahan iklim,” kata de Brum dalam press release tersebut.³⁷

Akhirnya pada KTT ke-44 PIF pemimpin tertinggi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan sepakat bahwa mereka yang akan mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mengatasi isu perubahan iklim. Pada poin ke delapan Majuro Declaration negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan menyatakan, *“We commit to be Climate Leaders* (Kami berkomitmen menjadi pemimpin iklim). Negara-negara PIF juga menyatakan bahwa *“to lead is to act* (memimpin artinya bertindak).” Artinya, mereka juga berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dalam mengurangi polusi gas rumah kaca dengan beralih menggunakan sumber energi yang terbarukan, bersih dan berkelanjutan. Komitmen tiap anggota dicatat di bagian akhir dari deklarasi.

Akhirnya memilih menjadi “pemimpin iklim” adalah strategi yang menarik untuk mendapatkan perhatian dunia. Selama ini tidak ada negara yang cukup berani mengklaim sebagai pemimpin dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Negara-negara dengan kekuatan besar yang notabene juga emiter besar seperti Amerika Serikat, China, India, Kanada dan negara-negara Uni Eropa seperti saling menunggu respon negara yang lain. Mengklaim sebagai pemimpin iklim bagi negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan adalah sesuatu yang ironis

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

karena emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan adalah salah satu yang terkecil di dunia. Namun, melalui ironi inilah mereka berusaha membangun kesadaran global dengan memanfaatkan legitimasi mereka sebagai “korban” perubahan iklim dan otoritas moral mereka sebagai negara-negara dengan emisi gas rumah kaca terkecil di dunia. Deklarasi Majuro sendiri diharapkan menjadi platform yang bisa mendorong tindakan negara-negara lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan segera.

Penutup

Secara materiil tidak banyak yang bisa dicapai melalui Majuro Declaration. Mengingat karena negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan yang terlibat dalam deklarasi tersebut bukan merupakan emiter besar, maka pengurangan emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan pun tidak signifikan. Namun, jika dilihat dari perspektif gerakan moral, maka ada dua pesan yang mungkin tersampaikan. Pertama, bahwa isu perubahan iklim adalah isu serius yang butuh penanganan mendesak karena terkait dengan kelangsungan hidup mereka yang tinggal di dataran rendah. Kedua, ketiadaan negara yang bersedia memimpin gerakan mengurangi emisi gas rumah kaca mempengaruhi masa depan rezim perubahan iklim.

Majuro Declaration merupakan usaha negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan untuk didengar, tidak hanya oleh negara, namun juga oleh masyarakat global. Memiliki keterbatasan sumber daya membuat mereka harus fokus (*niche*) pada isu tertentu. Situasi dan kondisi yang mereka hadapi dari dampak perubahan iklim menjadi legitimasi negara-negara ini ketika menyuarakan agar dunia memperhatikan isu perubahan iklim. Terlebih dengan kenyataan bahwa bagi penduduk negara-negara tersebut isu perubahan iklim bukan hanya sekedar isu politik atau pun ekonomi seperti yang dipahami oleh banyak negara di dunia, namun lebih merupakan isu kelangsungan hidup. Posisi sebagai korban dari perubahan iklim memberikan legitimasi.

Selain itu, fakta bahwa negara-negara tersebut bukanlah negara emiter besar, malah termasuk sebagai kelompok dengan kontribusi terkecil pada akumulasi gas rumah kaca, memberikan otoritas moral. Legitimasi dan otoritas moral menurut Joseph Nye adalah sumber soft power yang “dipanen” dari kebijakan luar negeri.

REFERENSI

- Anonim, 2013, Kiribati island: Sinking into the sea? BBC, 25 November 2013, diunduh dari <http://www.bbc.com/news/science-environment-25086963> pada 1 April 2014
- Anonim, 2009, ‘Climate Change Threatens Tuvalu’s Survival, Says Prime Minister Apisai Ielemia’, Press Release Parlemen Uni Eropa, Service of the European Parliament diunduh dari <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20091207IPR66100+0+DOC+XML+V0//EN> pada 12 Januari 2012.
- Anonim, Tuvalu’s Views on the Possible Security Implications of Climate Change to be included in the report of the UN Secretary General to the UN General Assembly 64th Session, diunduh dari http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/ga-64/cc-inputs/Tuvalu_CCIS.pdf pada 9 September 2015
- Armandhanu, Denny dan Indrani Putri, 2011, *Kanada Mundur dari Protokol Kyoto*, Vivanews, 13 Desember 2011, diunduh dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/271892-kanada-mundur-dari-protokol-kyoto> pada 6 Mei 2015.
- Associated Press in Majuro, 2015, Marshall Islands face acute water shortage, The Guardian online, 10 Mei 2013, diunduh dari <http://www.theguardian.com/world/2013/may/10/marshall-islands-acute-water-shortage> pada 13 September 2015.
- Brown, Chris dan Kirsten Ainley, *Understanding International Relations* (3rd ed.), Palgrave MacMillan, New York: 2005
- Brown, Oli, 2008, *Migration and Climate Change*, International Organization for Migration (IOM) Migration Research Series, Jenewa, diunduh dari <http://www.iom.int> pada 1 April 2014

- Burns, William C. G., 2003, "The Impact of Climate Change on Pacific Island Developing Countries in the 21st Century", in Alexander Gillespie and William C.G. Burns (eds.), *Climate Change in the South Pacific: Impacts and Responses in Australia, New Zealand, and Small Island States*, Kluwer Academic Publishers, New York
- Caballero-Anthony, Mely and P. K. Hangzo, 2013, RSIS Singapore: niche diplomacy through water expertise, 31 January 2013
- Caramel, Laurence, 2014, Besieged by the rising tides of climate change, Kiribati buys land in Fiji, the Guardian online, 1 July 2014, diunduh dari <http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-climate-change-fiji-vanua-levu> pada 12 Agustus 2015.
- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), 2011, International Climate Change Adaptation Initiative: Pacific Climate Change Science Program, diunduh dari http://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/4_PCCSP_Tuvalu_8pp.pdf pada 15 September 2015
- Dorney, Sean, 2013 *Forum Pasifik bertekad pimpin dunia hadapi perubahan iklim*, Radio Australia, 6 September 2013, diunduh dari <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-09-06/forum-pasifik-bertekad-pimpin-dunia-hadapi-perubahan-iklim/1186927> pada 6 Mei 2015
- Firth, Stewart, 2000, 'Decolonisation', dalam Robert Borofsky (ed.), *Remembrance of Pacific Pasts*, Honolulu, University of Hawai'i Press,
- Friedman, Thomas L., 2009, *Hot, Flat and Crowded: Mengapa Dunia Memerlukan Revolusi Hijau – dan Bagaimana Kita Memperbarui Masa Depan Global Kita (terj)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gillet, Robert. 2011. Fisheries of the Pacific Islands Regional and National Information. <http://www.fao.org/docrep/014/i2092e/i2092e00.pdf>. Diakses 21 Mei 2012.
- Glosserman, Brad, 2003, *Truth or Propaganda?* , South China Morning Post 5 juni 2003. Didownload dari www.library.unsw.edu.au bulan Juli 2003
- Hau'ofa, Epeli, 1998, 'The Ocean In Us', *The Contemporary Pacific*, 10:2, Fall
- Henrikson, Alan K, 2005, Niche Diplomacy in the World of Public Arena: the Global 'Corners' of Canada and Norway, dalam Jan Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Palgrave Macmillan

- <http://www.eastasiaforum.org/2013/01/31/singapore-niche-diplomacy-through-water-expertise/> pada 13 September 2013
- Kegley, Charles W., Jr and Eugene R. Wittkopf, 1996, *American Foreign Policy: Pattern and Process*, St. Martin Press, New York
- Kirby, Alex, 1999, Islands disappear under rising seas, BBC News 14 Juni 1999, diunduh dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/368892.stm> pada 13 Agustus 2015
- Knox, Angie, 2002, Sinking Feeling in Tuvalu, BBC News 28 Agustus 2002, diunduh dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2219001.stm> pada 13 Agustus 2015
- Leoni, Brigitte, Migration not a matter of choice but survival, says Kiribati President, The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 15 Maret 2012, diunduh dari <http://www.unisdr.org/archive/25649> pada 1 April 2014
- Leppman, Elizabeth J., 2006, *Australia And The Pacific*, Chelsea House Publishers, Philadelphia
- MAJURO, REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS, 3 – 5 SEPTEMBER 2013, diunduh dari http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2013_Forum_Communique_Final.pdf 28 September 2015
- Marks, Kathy, 2015, Climate change talks our 'last chance', say Pacific islands: 'This is not politics, it's survival', Independent online 7 September 2015, diunduh dari <http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/climate-change-talks-our-last-chance-say-pacific-islands-this-is-not-politics-its-survival-10490376.html> pada 10 Oktober 2015
- Mas'ood, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, edisi kedua*. LP3ES, Jakarta
- Microsoft Encarta Premium, 2009
- Mimura, Nobuo, 1999, Vulnerability of Island Countries in the South Pacific to Sea Level Rise and Climate Change, CLIMATE RESEARCH, Vol. 12: 137–143
- Morgenthau, Hans J., 1955, *Politics Among Nations*, Alfred Knopf, New York
- Nye, Joseph S., Jr, 2004, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Public Affairs Book, New York.

- , 2008, “*Public Diplomacy and Soft Power*”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science.
- Pacific Islands Forum Secretariat, 2013, Forum Communique, FORTY-FOURTH PACIFIC ISLANDS FORUM
- , *About Us*, diunduh dari <http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/> pada 15 Agustus 2015.
- Papp, Daniel S., 2001, *Contemporary International Relation: Framework for Understanding*(6th Edition), Longman, New York
- Republik Marshal Islands, 2015, Press Release: Climate Change Battering the Marshall Islands, Yokwe Online 23 Juni 2013, diunduh dari <http://www.yokwe.net/index.php?module=News&func=display&sid=3187> pada 13 September 2013
- Satish Chand, Economic challenges, Australia Strategic Policy Institution, 2008, Australia and the South Pacific: Rising to the challenge, Special Reports, Issue 12, March. Diunduh dari https://www.aspi.org.au/publications/special-report-issue-12-australia-and-the-south-pacific-rising-to-the-challenge/SR12_Australia_SouthPacific_V2.pdf pada 15 Januari 2015
- South, Robin G dan Joeli Veitayaki, 1999, Global Initiative in the South Pacific: Regional Approaches to Workable Arrangements, Asia Pacific Press at the Australian National University, Canberra lihat juga DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS, Agreement establishing the South Pacific Commission, AUSTRALIAN TREATY SERIES 1948 No. 15 diunduh dari <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/15.html> pada 10 September 2015
- The World Bank, Environment, diunduh dari <http://data.worldbank.org/topic/environment> pada 10 September 2015.
- van Wyk, Jo-Ansie, 2012, Nuclear diplomacy as niche diplomacy: South Africa's post-apartheid relations with the International Atomic Energy Agency, South African Journal of International Affairs, 19:2
- Vidal, John, 2013, 'We are fighting for survival,' Pacific islands leader warns Atolls are at risk of becoming uninhabitable as sea levels rise, Marshall islands president will tell summit, The Observer, 1 September 2013, diunduh dari <http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/01/pacific-islands-climate-change> pada 1 April 2014

Vogler, John, 2008, "Environmental Issues", in John Baylis et. al (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (fourth editions)*, Oxford University Press, Oxford

Wesley-Smith, Terence, 2007, 'Self-Determination in Oceania', *Race and Class*, 48: